

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi rangkuman tentang gambaran secara umum lokasi penelitian yaitu kantor DPC PKB dan PPP di Kabupaten Kudus. Gambaran umum ini meliputi profil singkat partai politik PKB dan PPP di Kabupaten Kudus, visi misi dan program kerja dari masing-masing partai, serta terkait dengan gambaran mengenai jumlah perolehan kursi partai politik Islam di Kabupaten Kudus pada pemilu tahun 2019. Disamping itu, pembahasan mengenai analisis hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian yaitu “Koalisi Partai Politik Islam dalam Pemenangan Pasangan Tamzil-Hartopo pada Pilkada di Kabupaten Kudus Tahun 2018”. Selanjutnya sesuai dengan rumusan masalah pada bab sebelumnya, maka fokus analisis hasil penelitian ini yaitu mengenai; proses terbentuknya koalisi partai politik Islam dalam pilkada kudus, motif koalisi, serta strategi dari partai politik PKB dan PPP menghadapi pelaksanaan pilkada di Kabupaten Kudus tahun 2018.

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Pemilihan Bupati Kudus Tahun 2018

Pada tanggal 27 Juni 2018, Kudus menyelenggarakan pemilihan bupati (pilbup). KPU kabupaten Kudus menetapkan lima pasangan kandidat peserta pilbup Kudus 2018 dan telah mengundi nomor urut peserta pilbup Kudus pada tanggal 13 Februari 2018 dengan nomor urut pasangan sebagai berikut.

Tabel 4.1
Daftar Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati
Kudus Tahun 2018 Berdasarkan Nomor Urut

No Urut	Pasangan Calon	Jabatan Terakhir	Pendukung
1	Masan-Noor Yasin	Calon Bupati: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kudus Periode 2014–2019. Calon Wakil Bupati: Sekretaris Daerah Kudus Periode 2012–sekarang	Demokrat PAN Golkar PDI-P
2	Nor	Calon Bupati: Wakil Ketua	Independen

No Urut	Pasangan Calon	Jabatan Terakhir	Pendukung
	Hartoyo-Junaidi	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kudus Periode 2009–2014. Calon Wakil Bupati: Staf Pemerintahan Kelurahan Mlati Norowito Kudus	
3	Sri Hartini-Setia Budi Wibowo	Calon Bupati: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode 2014–2019. Calon Wakil Bupati: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kudus Periode 2014–2019	PBB PKS Gerindra
4	Akhwan-Hadi Sucipto	Calon Bupati: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kudus Periode 2004–2009. Calon Wakil Bupati: Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, UMKM Kudus Tahun 2015	Independen
5	Muhammad Tamzil-Hartopo	Calon Bupati: bupati Kudus Peride 2003–2008. Calon Wakil Bupati: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kudus Periode 2014–2019	Hanura PPP PKB

Sumber : KPU Kabupaten Kudus, 2018¹

Dalam pemilihan bupati Kudus 2018, terdapat 611.879 pemilih yang tersebar di sembilan kecamatan, sebagai berikut.

¹ <https://www.kpu-kuduskab.go.id/pengumuman-nomor-urut-pasangan-calon-bupati-dan-wakil-bupati-dalam-pemilihan-bupati-dan-wakil-bupati-kudus-tahun-2018/>.

Tabel 4.2
Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati Kudus 2018

No	Kecamatan	Jml TPS	Jumlah Pemilih		Total
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Bae	121	25.331	26.170	51.501
2	Dawe	191	38.949	39.525	78.474
3	Gebog	179	36.944	37.371	74.315
4	Jati	181	37.573	39.196	76.769
5	Jekulo	193	38.858	39.887	78.745
6	Kaliwungu	174	36.124	36.492	72.616
7	Kudus	180	32.587	35.220	67.807
8	Mejobo	132	27.532	27.940	55.472
9	Undaan	140	27.781	28.399	56.180
Total		1.491	301.679	310.200	611.879

Sumber: www.infopemilu.kpu.go.id²

Tamzil bukan nama asing bagi warga Kudus. Dia pernah menjabat wakil bupati periode sebelumnya. Dalam pemilihan yang diselenggarakan DPRD setempat, pasangan Tamzil dari Partai Persatuan Pembangunan dan Noor Haniyah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan didaulat menjadi bupati dan wakil bupati Kudus periode 2003–2008. Tamzil-Noor merebut 26 dari 45 suara anggota DPRD. Sedangkan sisa 19 suara diraih pasangan Musthofa kader Pdl-P dan Asrofi dari Partai Kebangkitan Bangsa. Dia juga pernah menyalonkan diri sebagai gubernur Jateng, namun dikalahkan oleh Bibit Waluyo pada tahun 2008³. Setelah gagal dalam pemilihan gubernur, Tamzil yang berstatus PNS dirangkul oleh Bibit dan diangkat menjadi kepala dinas Cipta Karya provinsi Jawa Tengah dan asisten gubernur Jawa Tengah. Lalu di tahun 2013, dia mencalonkan diri menjadi bupati lagi

2

<https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dpt/1/JAWA%20TENGGAH/KUDUS>.

3 Tamzil maju berpasangan dengan Abdul Rozaq Rais dan dikalahkan Bibit Waluyo- Rustrningsih.

bersama Asyrofi, namun digoyang kasus korupsi saat dia masih menjabat bupati. Pada pilbup Kudus, dia dikalahkan oleh bupati incumbent Musthofa yang juga merupakan pesaingnya pada pencalonan bupati sebelumnya. Pada tahun 2013, Tamzil harus menghadapi kasus hukum atas sangkaan kasus korupsi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan kabupaten Kudus tahun 2004. Pengadilan Tipikor Semarang memvonisnya hukuman 22 bulan penjara. Dia baru bebas dari tahanan Kedungpane, Semarang pada Desember 2015 setelah mendapat pembebasan bersyarat usai menjalani masa Asimilasi Kerja Sosial (AKS).

Pada tahun 2018, Tamzil mencoba peruntungannya di dunia politik kembali dengan mendaftar sebagai calon bupati Kudus 2018–2023 bersama Hartopo, anggota DPRD Kudus periode 2014–2019 dari fraksi PDI-P. Meskipun calon wakil bupatinya dari fraksi PDI-P namun nyatanya mereka tidak mendapat dukungan dari partai tersebut. Ketua DPD PDI-P Kudus, Musthofa sebagai bupati incumbent yang juga menjadi rival Tamzil setiap pencalonan bupati di Kudus memberikan dukungan kepada Masan-Noor Yasin, dimana Masan merupakan anggota DPRD Kudus periode 2014–2019 sedangkan Noor Yasin adalah sekretaris daerah Kudus periode 2012–2018. Noor Yasin merupakan orang kepercayaan Musthofa selama menjabat sebagai bupati periode 2013–2018. Masan-Noor Yasin didukung oleh Demokrat, PAN, Golkar, dan PDI-P, sedangkan Tamzil didukung oleh Hanura, PPP, dan PKB. Meskipun dalam pagelaran pemilihan bupati Kudus 2018 diikuti oleh lima kandidat namun elektabilitas tertinggi dipegang oleh Masan-Noor Yasin.

Tabel 4.3
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kudus 2018

NO	Nama Pasangan Calon	Kaliwungu	Kota	Jati	Undan	Mejudo	Jekulo	Bee	Gebog	Duwe	Jumlah
1	MASAN, S.E, MM-Dir. NOOR YASIN, MM	27.889	16.646	27.241	23.291	17.681	25.444	13.392	17.014	25.695	194.093
2	H. NOOR HARTONO, S.H. JUNADI, S.H.	581	1.083	1.078	478	1.136	699	575	929	834	7.393
3	HL. SRI HARTINI, ST- H. SETIA BUDI WIDOWO, S.Ag, MM	8.020	7.175	7.235	4.490	10.294	7.908	5.902	14.741	11.027	76.792
4	H. AKHWAN, S.H-H. HADI SUICPTO, S.PD, MM	1.287	1.495	1.658	474	888	1.344	1.879	1.308	818	11.151
5	Ir H.MUHAMMAD TAMZIL, M.T.-H.M. HARTONO, ST, MM., MH	22.565	24.923	25.530	20.127	17.144	31.476	20.155	25.109	26.961	213.990

Sumber: Data KPU Kabupaten Kudus 2018

2. Gambaran Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Secara historis setelah runtuhnya orde baru tahun 1998 merupakan langkah kelahiran Partai Kebangkitan Bangsa yang dimulai dari tuntutan warga NU atas reformasi di bidang politik dan penyaluran aspirasi politik kaum nahdliyin secara bebas dan demokratis guna

menghindari kerancuan antar partai sebagai wadah aspirasi politik warga NU.⁴

Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto lengser keprabon akibat desakan arus reformasi yang kuat, mulai yang mengalir dari diskusi terbatas, unjuk rasa, unjuk keprihatinan, sampai istighosah, dan lain sebagainya. Peristiwa ini menandai lahirnya era baru di Indonesia, yang kemudian disebut Era Reformasi. Sehari setelah peristiwa bersejarah itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai banjir usulan dari warga NU di seluruh pelosok Tanah Air.

Usulan yang masuk ke PBNU sangat beragam, ada yang hanya mengusulkan agar PBNU membentuk parpol, ada yang mengusulkan nama parpol. Tercatat ada 39 nama parpol yang diusulkan. Nama terbanyak yang diusulkan adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat, dan Kebangkitan Bangsa. Ada juga yang mengusulkan lambang parpol. Unsur-unsur yang terbanyak diusulkan untuk lambang parpol adalah gambar bumi, bintang sembilan, dan warna hijau. Ada yang mengusulkan bentuk hubungan dengan NU, ada yang mengusulkan visi dan misi parpol, AD/ART parpol, nama-nama untuk menjadi pengurus parpol, ada juga yang mengusulkan semuanya. Di antara usulan yang paling lengkap berasal dari Lajnah Sebelas Rembang yang diketuai KH M Cholil Bisri dan PWNU Jawa Barat. Dalam menyikapi usulan yang masuk dari masyarakat Nahdliyin, PBNU menanggapi secara hati-hati. Hal ini didasarkan pada adanya kenyataan bahwa hasil Mukhtamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis.

Namun demikian, sikap yang ditunjukkan PBNU belum memuaskan keinginan warga NU. Banyak pihak dan kalangan NU dengan tidak sabar bahkan langsung menyatakan berdirinya parpol untuk mewedahi aspirasi politik warga NU setempat. Di antara yang sudah mendeklarasikan sebuah parpol adalah Partai Bintang

⁴ Ridho Al Hamdi, *Partai Politik Islam Teori Dan Praktik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 101.

Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat (Perkanu) di Cirebon.

Akhirnya, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998. Forum ini menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU. Tim Lima diketuai oleh KH Ma`ruf Amin (Rais Suriyah/Kordinator Harian PBNU), dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr KH Said Aqil Siroj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir, S.E., M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Untuk mengatasi hambatan organisatoris, Tim Lima itu dibekali Surat Keputusan PBNU.

Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima seiring semakin derasnya usulan warga NU yang menginginkan adanya partai politik, maka Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah PBNU pada tanggal 20 Juni 1998 memberi Surat Tugas kepada Tim Lima. Selain itu juga dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma`ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni, dan Muhaimin Iskandar. Tim Asistensi bertugas membantu Tim Lima dalam menginventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk parpol baru, dan membantu warga NU dalam melahirkan parpol baru yang dapat mawadahi aspirasi politik warga NU.⁵

Pada tanggal 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasi tugas-tugasnya. Tanggal 26 - 28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyering di Villa La Citra Cipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan parpol. Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan, yaitu: Pokok-pokok Pikiran NU Mengenai Reformasi Politik, Mabda` Siyasi, Hubungan

⁵ Ridho Al Hamdi, *Partai Politik Islam Teori Dan Praktik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)

Partai Politik dengan NU, AD/ART dan Naskah Deklarasi. Sang inisiator pembentukan parpol bagi warga NU, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur prihatin bahwa kelompok-kelompok NU ingin mendirikan partai politik NU. Lantaran ini terkesan mengaitkan agama dan politik partai. Medio akhir Juni 1998, sikapnya mengendur dan bersedia menginisiasi kelahiran parpol berbasis ahlussunah wal jamaah.

Keinginan Gus Dur diperkuat dukungan deklarator lainnya, yaitu KH Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH A. Mustofa Bisri serta KH A. Muchith Muzadi. Proses selanjutnya, penentuan nama partai disahkan melalui hasil musyawarah Tim Asistensi Lajnah, Tim Lajnah, Tim NU, Tim Asistensi NU, Perwakilan Wilayah, para tokoh pesantren, dan tokoh masyarakat.

Melihat proses yang lama pada tanggal 23 Juli 1998 resmi didirikan partai baru yakni PKB di tempat Gusdur, Ciganjur Jakarta Selatan, PKB dilahirkan dari NU untuk bangsa Indonesia yang bercontoh pada Walisongo untuk membangun tatanan masyarakat dengan gerakan moral dan spiritual. PKB memiliki lingkungan kebudayaan dan keagamaan yang khas, dengan menjunjung nilai Islam Ahlussunnah Wal Jamaah. Setiap anggota dan aktivis partai baik perorangan/kolektif harus konsisten dalam memperjuangkan kelestarian lingkungan kebudayaan dan nilai keagamaan tanpa menghindari perubahan sunnatullah.⁶

Perolehan suara PKB dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 kembali meroket. Dengan pencapaian 11.292.151 suara (9,04%) atau setara 47 kursi di DPR RI. Padahal, lima tahun sebelumnya atau Pemilu priode 2004-2009, PKB hanya memperoleh 5.146.302 suara (4,95 persen) dan mendapat 28 kursi DPR RI. Ketokohan dan kepemimpinan Gus Dur terbukti ampuh mendongkrak suara PKB di Pemilu 1999. Pesta demokrasi perdana yang diikuti Green Party ini sukses besar dengan meraup 13.336.982

⁶ Musa Kazhim dan Alfian Hamzah, Lima Partai Dalam Timbangan PAN, PBB, PDI Perjuangan, PKB, PPP Analisis Dan Prospek, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), 249-250.

suara (12,61 persen) setara 51 kursi di DPR RI. Pada Pemilu tahun 2004-2009, PKB kembali masuk dalam lingkaran lima besar. Dimana peringkat PKB pada waktu itu berada di peringkat ketiga dengan raihan 12.002.885 suara (10,61 persen) dan mendapat 52 kursi DPR RI. Sayangnya, pada Pemilu 2009-2014 perolehan suara PKB melorot tajam. Partai anak kandung NU ini hanya meraih 5.146.302 suara (4,95 persen) dan mendapat 28 kursi DPR.

Visi Partai Kebangkitan Bangsa adalah mewujudkan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945, mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik secara materiil maupun spiritual, serta mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakarakter baik. Misi PKB dalam berbagai bidang, termasuk di bidang ekonomi: memelihara dan mengembangkan kehidupan ekonomi rakyat yang adil dan demokratis. Di bidang hukum: berjuang untuk memelihara dan mengembangkan negara yang beradab yang diatur oleh hukum, mampu melindungi semua orang dan menegakkan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Di bidang sosial budaya: berusaha membangun budaya modern yang maju dengan tetap menjaga rasa jati diri bangsa yang baik untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Di bidang pendidikan: berupaya meningkatkan kualitas talenta yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional, dan kritis terhadap lingkungan dan lingkungan sekitar, serta berupaya mewujudkan sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, terjangkau, dan berkelanjutan. Di bidang pertahanan negara: Mewujudkan kesadaran akan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam kerja pertahanan negara, mendorong pembelaan diri masyarakat terhadap perlakuan tidak aman dari individu dan lembaga masyarakat tertentu.⁷

Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kudus mempunyai beberapa program perjuangan partai salah

⁷ AD/ART Partai Kebangkitan Bangsa, ed. by Moch Bisri Muchlisin, (Jakarta Pusat: Sekertariat Jendral DPP PKB, 2014).

satunya mengusulkan bisaroh madin, TPQ dan kemudian menghidupkan pondok-pondok pesantren, madrasah.⁸

3. Gambaran Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Partai Persatuan Pembangunan didirikan pada tanggal 5 Januari 1973 sebagai hasil peleburan empat partai politik Islam, yaitu Partai Nadhlatul Ulama, Partai Islam Perti, dan Partai Muslimin Indonesia, dan Syarikat Islam Indonesia (PSII). Fusi ini menjadi simbol kekuatan Partai Persatuan Pembangunan, partai yang mampu menyatukan berbagai faksi dan golongan dalam Islam. PPP didirikan oleh lima pemimpin, yang merupakan pemimpin dari empat partai Islam yang bersaing dalam pemilihan umum 1971, dan ketua Kelompok Aliansi Pembangunan, sebuah faksi dari empat partai Islam di DPR. Yang menyatakan adalah KH Idham Chalid (Presiden PB Nadhlatul Ulama), H. Mohammad Syafaat Mintaredja, SH (Presiden Partai Muslim Indonesia), Haji Anwar Tjokroaminoto (Presiden PSII), Haji Rusli Halil (Presiden Partai Muslim Indonesia) Perti Islam Partai) dan Haji Mayskur (Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan DPR).⁹

Partai Persatuan Pembangunan telah berpartisipasi dalam enam pemilu sejak 1977. Faktanya, pada Pemilu 1999, 2004 dan 2009, perolehan suara PPP menurun. Hal ini menimbulkan tantangan bagi Partai Persatuan Pembangunan. Untuk mendapatkan kembali kejayaannya, PPP mendeklarasikan dirinya sebagai Rumah Besar Umat Islam. Definisi ini mengartikan bahwa PPP adalah tempat umat Islam kembali, terutama untuk menyalurkan aspirasi dan menindaklanjutinya. PPP merupakan suaka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena PPP terus memperjuangkan keinginan

⁸ Ilwani, Selaku Ketua DPC PKB Kabupaten Kudus Periode 2013-2020, Wawancara Dengan Penulis, Pada Hari Minggu, 10 April 2022, Pukul 09.00 WIB, di Rumah Bapak Ilwani Jekulo Kudus, Wawancara II, Transkrip.

⁹ Partai Persatuan Pembangunan, <https://www.petiga.or.id/> , diakses pada tanggal 26 Maret 2022

umat Islam dari berbagai langkah yang dapat merugikan umat Islam itu sendiri.¹⁰

Partai Persatuan Pembangunan mempunyai visi yang pertama terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan menjadi negara Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, bermoral, demokratis, penghormatan terhadap HAM, tegaknya supremasi hukum, serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keIslaman. Kemudian PPP mempunyai misi sebagai berikut:

- a. PPP berupaya mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, dan mengembangkan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan antar umat Islam).
- b. PPP memperjuangkan hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan menitikberatkan pada nilai-nilai agama, khususnya ajaran Islam, dengan mengembangkan ukhuwah basyariyah (persaudaraan sesama manusia).
- c. PPP berupaya menjaga rasa aman, memelihara dan mempererat persatuan dan kesatuan NKRI dengan mengembangkan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan bangsa).
- d. PPP berusaha menerapkan dan mengembangkan kehidupan politik yang mewujudkan demokrasi sejati dan kedaulatan rakyat.
- e. PPP memperjuangkan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridloi oleh Allah SWT, balaatun thayyibatun wa rabbun ghofur.¹¹

¹⁰ Partai Persatuan Pembangunan, <https://www.petiga.or.id/> , diakses pada tanggal 26 Maret 2022

¹¹ Ulwan Hakim, Selaku Ketua DPC PPP Kabupaten Kudus, Wawancara Dengan Penulis, Pada Hari Jum'at, 25 Maret 2022, Pukul 17.00 WIB, di Kantor DPC PPP Kudus, Wawancara IV, Transkrip.

B. Temuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di DPC Partai Politik Islam PPP dan PKB di Kabupaten Kudus. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti terdapat beberapa persiapan dan strategi dari masing-masing partai untuk membentuk suatu koalisi dengan partai lain mulai dari pra hingga pasca pilkada berlangsung. Dalam hal ini pembentukan koalisi di pengaruhi oleh beberapa faktor.

Sebelum lebih jauh membahas mengenai proses terbentuknya koalisi dan motif dari masing-masing partai politik melakukan koalisi, terlebih dahulu kita melihat peta kekuatan dari masing-masing partai politik di DPRD hasil Pemilu 2019 di Kabupaten Kudus. Seperti pernyataan dari Pamungkas, partai politik secara umum dapat dimaknai sebagai organisasi yang memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui penguasaan struktur dan kekuasaan yang diperoleh melalui keikutsertaan dalam kontestasi pemilu.¹²

Tabel 4.4
Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019

Nomor Partai Politik	Nama Partai Politik	Rincian				Jumlah Akhir
		Dapil Kudus 1	Dapil Kudus 2	Dapil Kudus 3	Dapil Kudus 4	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1			1	7
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	1	2	2	6
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3	2	1	2	8
4	Partai Golongan Karya	1	2	2	2	7
5	Partai NasDem	1	1	1	1	4
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia					
7	Partai Berkarya					
8	Partai Keadilan Sejalitera	1	1	1	1	4
9	Partai Persatuan Indonesia					
10	Partai Persatuan Pembangunan		1		1	2
11	Partai Solidaritas Indonesia					
12	Partai Amanat Nasional	1	1		1	3
13	Partai Hati Nurani Rakyat	1			1	2
14	Partai Demokrat	1		1		2
19	Partai Bulan Bintang					
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia					
Jumlah Seluruh Kursi Partai Politik		11	11	11	12	45

Sumber : Data KPU Kabupaten Kudus

¹² S. Pamungkas, *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia* (Yogyakarta: Institut for Democracy and Welafriism, 2011)

Dari 45 kursi, PDI Perjuangan menjadi partai terbanyak yang mendapat perolehan kursi di DPRD Kabupaten Kudus periode tahun 2019-2024, dengan memperoleh sebanyak 8 kursi. Kemudian diposisi kedua disusul PKB yang meraih 7 kursi. Sedangkan Partai Golkar juga meraih 7 kursi.

Tabel 4.5
Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Kudus

Partai Peserta Pemilu	Jumlah Suara
PKB	75.760
Gerindra	71.247
PDI P	86.069
Golkar	62.561
NasDem	34.268
Garuda	6.089
Partai Berkarya	6.021
PKS	34.543
Perindo	11.946
PPP	28.978
PSI	5.239
PAN	30.144
Hanura	27.536
Demokrat	20.101
PBB	4.941
PKPI	281

Sumber : *Data KPU Kabupaten Kudus.*

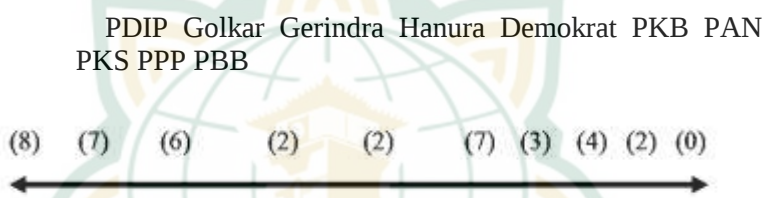
Memerhatikan pemetaan politik di DPRD Kabupaten Kudus dari hasil pemilu tahun 2019, PDI-P masih memposisikan diri sebagai pemenang dengan perolehan suara 86.069. Adapun Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan partai Islam yang memperoleh suara tertinggi dengan total 75.760 suara.

Setelah mengetahui seberapa kuat masing-masing partai di DPRD, penulis akan mencoba menggabungkan kekuatan partai berupa jumlah kursinya di parlemen dengan ideologi yang menjadi platform partai. Dalam hal ini, penulis

akan mencoba menggambarkan model dengan diagram yang diusulkan oleh Lijphart.

Lijphart menggambarkan partai politik dari segi ideologi dan ruang lingkup perolehan suara, di mana partai dibedakan dari ekstrem kiri hingga ekstrem kanan. Adapun di posisi tengah adalah partai yang dekat dengan kedua ekstrem ideologis. Mengacu pada asumsi Lijphart, gambaran yang terbentuk pada susunan partai DPRD adalah sebagai berikut.

Gambar 4.1 Kecenderungan Ideologi Partai Politik pada Pilkada di Kabupaten Kudus tahun 2018



Sumber: Model spektrum ideologi Lijphart

Jika kita perhatikan gambar di atas, panah di sebelah kanan mewakili posisi ideologis partai-partai Islam, sedangkan panah di sebelah kiri mewakili partai-partai yang bercorak nasionalis. Posisi dari paling kanan ke kiri ditempati oleh partai-partai dengan kursi paling kiri dan kursi lebih kecil. PDI-P dengan kursi terbesar ada di paling kiri, dan PBB dengan kursi terkecil ada di paling kanan.

1. Motif dan Proses Terbentuknya Koalisi Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kudus Tahun 2018

Pemilihan Kepala Daerah menjadi agenda lima tahunan di Indonesia. Di berbagai daerah di wilayah Indonesia dari tingkat kabupaten/kota dan provinsi, kepala pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat. Ketika membahas kontestasi pemilihan kepala daerah tidak dapat dilepaskan dengan strategi pemenangan. Tentu saja strategi yang matang dalam pemilihan sangat penting, sebab strategi yang matang menentukan kemenangan.

Sebagaimana dengan pemaparan terkait strategi dan persiapan dari masing-masing partai politik untuk

menghadapi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kudus tahun 2018,

1) Strategi menghadapi Pilkada

Strategi Partai Kebangkitan Bangsa dalam menghadapi pilkada 2018 di Kabupaten Kudus adalah menata kepengurusan dari ranting hingga kabupaten, membuat isu yang tepat sesuai kondisi, membentuk desk pemilukada, silaturahmi pada tokoh-tokoh, diskusi intensif antar partai, kemudian penjajakan untuk koalisi dengan partai lain, menentukan kandidat atau bakal calon untuk dimintakan rekomendasi dari DPP.

Bapak Ilwani selaku Ketua DPC PKB Kudus Periode 2013-2020 menjelaskan,

“Persiapannya ya menata pengurus dari ranting sampai kabupaten. Kemudian membuat isu-isu yang tepat sesuai kondisi pada waktu itu. Ya seperti pada umumnya strategi yang kami lakukan dalam pemilukada dengan membentuk desk pemilukada, dimana desk pemilukada ini sangat dibutuhkan dan sudah ada juklak dan juknis dari partai sendiri. Kemudian kita mengintensifkan silaturahmi pada tokoh-tokoh atau mungkin pada bakal-bakal calon atau yang namanya sering disebut masyarakat untuk menjadi bakal calon yang akan disampaikan kita silaturahmi. Kemudian yang ketiga, adalah menjaring nama-nama bakal calon itu kemudian diskusi intensif baik dengan internal partai maupun dengan eksternal partai tentang pemilukada ini. Kemudian selanjutnya adalah melakukan penjajakan untuk koalisi partai dengan partai-partai lain dimana untuk dapat mengusung calon bupati itu kan diperlukan gabungan partai, sehingga nanti bisa berjumlah 20% dari total kursi yang ada di Kudus jadi sekitar diperlukan untuk menjadi bakal calon harus seorang calon atau pasangan calon harus mempunyai kendaraan yang jumlah kursinya adalah sembilan. Kemudian yang terakhir adalah menentukan bakal calon yang

akan kita ajukan agar kita mintakan rekomendasi dari DPP. Kemudian nanti akan keluar rekomendasi pasangan bakal calon mana yang akan direkomendasi oleh Partai Kebangkitan Bangsa untuk bisa menjadi calon bupati yang akan diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa”.¹³

Sedangkan strategi Partai Persatuan Pembangunan dalam menghadapi pilkada 2018 di Kabupaten Kudus diungkapkan oleh Bapak Ulwan selaku Ketua DPC PPP Kudus Periode 2016-2021 sebagai berikut,

“Pertama si untuk mendukung calon yang kami lakukan sebelum pilkada itu salah satunya penyampaian visi misi si calon yang kita usung ya jadi kader kami kerahkan kemudian menjelaskan visi misi calon dukungan kami untuk supaya mengusung calon dari kami yang kami usung. Jadi kita PPP ini punya harapan cara kita itu masyarakat bisa memahami calon yang didukung kami. Pasti menang. Strategi pas pilkada ya kita sama seperti lainnya konsolidasi internal sama partai pendukung dan kita juga ada sosialisasi. Sosialisasinya ke pemilih partai PPP nah ini agar tidak ada kesalahfahaman.”¹⁴

2) Struktural dan Pertimbangan Koalisi dalam Pilkada

Partai Kebangkitan Bangsa dalam melakukan koalisi mempunyai pertimbangan salah satunya menjalin koalisi dengan PPP karena kedekatan ideologis, sama-sama partai berasas Islam ataupun basis massa Islam dan memiliki kepentingan yang sama.

“Waktu pilkada 2018 kita berkoalisi dengan PPP dan Hanura. Dan pertimbangan ya ada.

¹³ Ilwani, Selaku Ketua DPC PKB Kabupaten Kudus Periode 2013-2020, Wawancara Dengan Penulis, Pada Hari Minggu, 10 April 2022, Pukul 09.00 WIB, di Rumah Bapak Ilwani Jekulo Kudus, Wawancara II, Transkrip.

¹⁴ Ulwan Hakim, Selaku Ketua DPC PPP Kabupaten Kudus Periode 2016-2021, Wawancara Dengan Penulis, Pada Hari Jum'at, 25 Maret 2022, Pukul 17.00 WIB, di Kantor DPC PPP Kudus, Wawancara IV, Transkrip.

Pertimbangannya kan kalau sama PPP sama-sama partai hijau. Kemudian mereka kecil partainya. Jadi kalau sudah jadi enak”¹⁵.

Adapun dalam hal pembentukan koalisi dari Partai Persatuan Pembangunan melakukan komunikasi politik dan penjajakan ke berbagai pihak partai politik secara formal maupun informal terutama yang memiliki kursi di DPRD. Partai Persatuan Pembangunan membangun komunikasi dengan seluruh partai politik untuk membangun titik temu dalam mengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati yang memiliki karakter nasionalis-religius. Pertimbangan PPP dalam berkoalisi hampir sama seperti yang lain antara lain mempunyai kepentingan yang sama.

“Kemarin Pilkada kudu tahun 2018 PPP berkoalisi dengan PKB dan Hanura, komunikasi politik dan penjajakan kami terus lakukan ke berbagai pihak partai politik secara formal maupun informal terutama yang memiliki kursi di DPRD. Partai Persatuan Pembangunan membangun komunikasi dengan seluruh partai politik untuk membangun titik temu dalam mengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati yang memiliki karakter nasionalis-religius. Beberapa pertimbangan PPP dalam berkoalisi hampir sama seperti yang lain antara lain mempunyai kepentingan yang sama”¹⁶.

3) Kendala dalam berkoalisi

Partai Kebangkitan Bangsa dalam melakukan koalisi mengalami kendala dengan calon yang diusung sulit di nasehati ketika sudah jadi. Dan dengan partai

¹⁵ Ilwani, Selaku Ketua DPC PKB Kabupaten Kudus Periode 2013-2020, Wawancara Dengan Penulis, Pada Hari Minggu, 10 April 2022, Pukul 09.00 WIB, di Rumah Bapak Ilwani Jekulo Kudus, Wawancara II, Transkrip.

¹⁶ Ulwan Hakim, Selaku Ketua DPC PPP Kabupaten Kudus Periode 2016-2021, Wawancara Dengan Penulis, Pada Hari Jum'at, 25 Maret 2022, Pukul 17.00 WIB, di Kantor DPC PPP Kudus, Wawancara IV, Transkrip.

koalisi setelah selesai pilkada terpisah karena sama-sama membesarkan partainya sendiri.

“Kendala ada pasti. Kendala partai yang koalisi pasti tidak mau kalah. Kendalanya sulit memahami pada calon yang jadi. Setelah jadi dinasehati juga sulit. Kemudian upaya kita untuk mengatasinya ya pendekatan, komunikasi. Dan dengan partai koalisi setelah selesai pilkada pisah-pisah karena sama-sama membesarkan partainya kalau manut pasti tidak mau karna saingan. Calonnya juga di bilangin susah karena merasa sudah jadi. Rata-rata kalau sudah jadi begitu. Sehingga nanti kalau dia nyalon ya mencari partai lagi, merasa tidak puas. Dikira di partai yang di luar pengusung itu enak dikira”.¹⁷

Terkait kendala yang dihadapi Partai Persatuan Pembangunan saat berkoalis, Bapak Ulwan selaku Ketua DPC PPP Kudus Periode 2016-2021 mengatakan, “Terkait kendala sendiri dengan berbagai pihak partai politik tidak ada yang begitu berarti karena kita aktif melakukan komunikasi politik dengan baik”.¹⁸

PPP menyatakan tidak ada kendala dengan semua partai politik karena aktif melakukan diskusi atau komunikasi politik dengan berbagi pihak.

4) Dinamika koalisi Partai

Peneliti menggali informasi mengenai dinamika koalisi Partai Kebangkitan Bangsa,

¹⁷ Ilwani, Selaku Ketua DPC PKB Kabupaten Kudus Periode 2013-2020, Wawancara Dengan Penulis, Pada Hari Minggu, 10 April 2022, Pukul 09.05 WIB, di Rumah Bapak Ilwani Jekulo Kudus, Wawancara II, Transkrip.

¹⁸ Ulwan Hakim, Selaku Ketua DPC PPP Kabupaten Kudus Periode 2016-2021, Wawancara Dengan Penulis, Pada Hari Jum'at, 25 Maret 2022, Pukul 17.05 WIB, di Kantor DPC PPP Kudus, Wawancara IV, Transkrip.

“Kalau koalisi tentu dinamis, pasti oyok-oyok an kalau sudah jadi”.¹⁹

- 5) Sikap dari Partai mengawal pasangan calon terpilih Tamzil-Hartopo

Peneliti juga menggali informasi mengenai sikap yang akan diambil Partai Kebangkitan Bangsa untuk mengawal pasangan calon pemenang Tamzil-Hartopo dalam Pilkada di Kabupaten Kudus tahun 2018, Bapak Ilwani selaku Ketua DPC PKB Kudus Periode 2013-2020 menjelaskan,

“Dengan pasangan calon yang diusung PKB ada MOU yang berisi hak dan kewajiban antara calon dan partai dari mulai pra pencalonan sampai apabila calon yang di usung terpilih. Andai calon yang di usung jadi, partai mengawal perjalanan bupati/cawabup dengan memberikan masukan rutin. Intinya di komunikasi dan silaturahmi politik”.²⁰

Dari pemaparan wawancara diatas menjelaskan Partai Kebangkitan Bangsa akan mengawal perjalanan bupati/cawabup dengan komunikasi aktif dan memberikan masukan rutin.

Kemudian respon dari Bapak Ulwan selaku Ketua DPC PPP Kudus Periode 2016-2021 terkait sikap yang diambil terhadap pasangan Tamzil-Hartopo setelah terpilih,

“Sebagai partai pendukung, kita PPP dengan pasangan calon akan melakukan pengawalan dan memberikan masukan serta saran yang berkaitan dengan kebijakan secara rutin dan menyampaikan

¹⁹ Ilwani, Selaku Ketua DPC PKB Kabupaten Kudus Periode 2013-2020, Wawancara Dengan Penulis, Pada Hari Minggu, 10 April 2022, Pukul 09.05 WIB, di Rumah Bapak Ilwani Jekulo Kudus, Wawancara II, Transkip.

²⁰ Ilwani, Selaku Ketua DPC PKB Kabupaten Kudus Periode 2013-2020, Wawancara Dengan Penulis, Pada Hari Minggu, 10 April 2022, Pukul 09.05 WIB, di Rumah Bapak Ilwani Jekulo Kudus, Wawancara II, Transkip.

harapan rakyat kepada pasangan calon yang terpilih”.²¹

Dari pemaparan wawancara diatas menjelaskan sikap yang diambil dengan pasangan calon terpilih Tamzil-Hartopo adalah Partai Persatuan Pembangunan akan melakukan pengawalan dan memberikan masukan serta saran yang berkaitan dengan kebijakan dan menyampaikan harapan rakyat kepada pasangan calon.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan data dari penelitian diatas selanjutnya peneliti akan menyusun secara sistematis hasil yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dengan memaparkan hasil dari analisis data “Motif dan Proses Terbentuknya Koalisi PKB, PPP, dan Hanura dalam Pemenangan Pasangan Tamzil-Hartopo pada Pilkada di Kabupaten Kudus Tahun 2018”. Guna menjawab rumusan masalah dan melakukan perbandingan mengenai penelitian diatas, maka penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Arend Lijphart mengenai lima model terbentuknya koalisi berdasarkan jenis serta teori dari Micheal Laver mengenai pendekatan koalisi partai politik. Selain itu, peneliti juga menggunakan teori Geoffrey Pridham mengenai motif koalisi partai politik dalam pembentukan koalisi.

1. Proses Terbentuknya Koalisi Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kudus Tahun 2018

Ketika membahas kontestasi pemilihan kepala daerah tidak dapat dilepaskan dengan strategi pemenangan. Tentu saja strategi yang matang dalam pemilihan sangat penting, sebab strategi yang matang menentukan kemenangan.

Berdasarkan data hasil penelitian mengenai strategi dan persiapan dari masing-masing partai politik Islam untuk menghadapi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kudus tahun 2018 secara umum adalah: *Pertama*, membentuk desk pemilukada; *Kedua*,

²¹ Ulwan Hakim, Selaku Ketua DPC PPP Kabupaten Kudus Periode 2016-2021, Wawancara Dengan Penulis, Pada Hari Jum’at, 25 Maret 2022, Pukul 17.05 WIB, di Kantor DPC PPP Kudus, Wawancara IV, Transkrip.

silaturahmi pada tokoh; *Ketiga*, komunikasi politik atau diskusi antar partai; *Keempat*, menentukan bakal calon; *Kelima*, membentuk koalisi.

Salah satu yang menunjukkan keefektifitasan partai politik ditentukan dari kemampuan partai tersebut dalam menentukan kebijakan program dan langkah operasionalnya. Maka langkah operasionalnya serta kebijakan program partai didasarkan pada visi misi partai. Cara partai politik agar calon yang didukungnya mendapat suara terbanyak salah satunya adalah dengan koalisi. Jika partai berkoalisi mempunyai tujuan yang sama yang dengan cara yang baik maka hasil yang didapatkan akan maksimal. Umumnya, negara yang roda pemerintahannya menggunakan sistem multipartai dibangun atas dasar koalisi dari gabungan partai politik.²²

Michael Laver melihat perspektif teori pilihan rasional melalui dua cara umum untuk menjelaskan mengapa partai politik membentuk koalisi, *office-seeking* dan *policy-seeking*. Kemudian Arend Lijphart mengemukakan adanya lima model pembentukan koalisi berdasarkan jenis :

Tabel 4.6
Lima Model Pembentukan Koalisi Berdasarkan Jenis

Bentuk Koalisi	Uraian	Tipe Pendekatan
<i>Minimal winning coalition</i>	Ciri dari bentuk koalisi ini adalah partai memaksimalkan kekuasaan sebanyak mungkin dengan tidak mengabaikan posisi partai dan spektrum ideologi	Tergolong dalam pendekatan <i>office-seeking</i>
<i>Minimal size coalition</i>	Ciri dari bentuk koalisi ini adalah partai dengan perolehan suara banyak mencari partai kecil hanya untuk mencapai suara mayoritas	
<i>Bergaining</i>	Ciri dari bentuk koalisi ini	

²² Abdar, *Koalisi Partai Politik Dalam UU No.10 tahun 2016*, Jurnal Hukum Magnum Opus Vol.1 No.1 (2018), 1-8.

Bentuk Koalisi	Uraian	Tipe Pendekatan
<i>potition</i>	adalah partai membangun koalisi berdasarkan jumlah partai yang sedikit dengan tujuan untuk memudahkan negosiasi atau tawar menawar	
<i>Minimal Range Coalition</i>	Ciri dari bentuk koalisi ini adalah partai membangun koalisi dengan adanya kedekatan ideologis atau platform partai sehingga memudahkan menjalin koalisi	Tergolong pendekatan <i>policy-seeking</i>
<i>Minimal Connected Winning Coalition</i>	Ciri dari bentuk koalisi ini adalah partai membangun koalisi dengan adanya kedekatan orientasi kebijakan baik secara ideologis atau posisi partai. Koalisi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh kekuasaan tetapi ada pertimbangan ideologis dan kebijakan	

Jika mengacu pada teori koalisi Arend Lijphart, maka dalam konteks keseluruhan koalisi parpol pada Pilkada Kabupaten Kudus 2018, model koalisi lebih condong pada *minimal winning coalition*. Bentuk koalisi ini lebih menekankan pada pemaksimalan kekuasaan daripada fokus pada jarak dan kedekatan ideologis dengan platform partai. Hal ini terlihat pada struktur koalisi partai pendukung masing-masing pasangan calon yang memiliki varian ideologi yang sangat beragam, beberapa di antaranya nasionalisme, Islamisme, dan nasionalisme religius. Koalisi yang terjadi tidak memperhitungkan jarak ideologis dan kedekatan platform partai, seperti terlihat pada partai-partai pendukung yang berbeda ideologi.²³

Menggunakan teori yang dikemukakan oleh Arend Lijphart maka hasil penelitian mengenai koalisi yang

²³ Romli, *Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal*, (Jurnal Penelitian Politik, 2018), 143-160.

terjadi pada Pilkada Kabupaten Kudus tahun 2018 antara PKB, PPP, dan Hanura dalam kemenangan pasangan Tamzil-Hartopo mengindikasikan pada bentuk koalisi *Minimal size coalition* dan merujuk pada teori Micheal Laver maka bentuk koalisi tersebut tergolong tipe pendekatan *office seeking*. Partai Kebangkitan Bangsa sebagai partai yang berbasis Islam dengan perolehan suara tertinggi dalam melakukan koalisi mencari partai kecil untuk mencapai suara mayoritas.

2. **Motif Koalisi Partai Politik Islam Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kudus Tahun 2018**

Merujuk pada teori dari Geoffrey Pridham mengenai motif koalisi partai politik, dapat diperhatikan ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti kesamaan platform (ideologis), historis, dan perebutan kekuasaan (pragmatis) dalam proses pembentukan koalisi. Biasanya motivasi di antara mitra koalisi bertemu atas isu kebijakan, lalu seberapa jauh prioritas dari isu tersebut dapat berhubungan dengan identitas atau strategi partai.

Tabel 4.7
Motif Koalisi Partai Politik

Faktor	Proses
Faktor Ideologis	1. Kesamaan platform partai politik serta visi misi yang sama menjadi pertimbangan dalam membangun koalisi 2. Partai politik melakukan penjaringan dan pendekatan dengan calon yang dianggap mampu mewakili visi misi dari partai
Faktor Historis	1. Beberapa partai politik sudah menjalin relasi sebelum berlangsungnya pemilihan kepala daerah 2. Beberapa partai terlibat koalisi aktif (satu fraksi di DPRD, memiliki posisi yang sama,

Faktor	Proses
	misal: oposisi)
Faktor Pragmatis	1. Tujuan utamanya adalah merebut kekuasaan 2. Pertimbangan yang dipakai adalah tingkat keterpilihan calon dari kader internal maupun eksternal partai 3. Partai mengkapitalisasi keuntungan dalam pilkada

Akan tetapi koalisi yang terjadi pada Pilkada di Kabupaten Kudus tahun 2018 dibangun dengan tidak memperhatikan kedekatan preferensi kebijakan, apalagi dalam praktiknya masalah ideologi partai amat jarang menjadi perhatian. Partai yang berkoalisi secara ideologi banyak memiliki perbedaan yang secara prinsip terkadang berseberangan. Sehingga motivasi koalisi atas dasar kesamaan platform sangat rendah pengaruhnya dalam pembentukan koalisi Pilkada di Kabupaten Kudus tahun 2018 tersebut. Dalam pilkada kabupaten kudus tahun 2018 motif terbentuknya koalisi lebih mengarah pada faktor pragmatis (perebutan kekuasaan).

Adapun Partai Kebangkitan Bangsa dalam berkoalisi mempunyai pertimbangan salah satunya karena sama-sama partai hijau dengan Partai Persatuan Pembangunan. Selain itu, karena PKB menganggap bahwa Partai Persatuan Pembangunan termasuk partai kecil jadi mudah untuk diajak koalisi. Adapun Partai Persatuan Pembangunan dalam berkoalisi mempunyai pertimbangan sama seperti partai yang lain salah satunya mempunyai kepentingan yang sama.

Dapat disimpulkan bahwa motif koalisi yang terjadi antara PKB, PPP, dan Hanura menurut teori dari Geoffrey Pridham cenderung mengarah pada faktor pragmatis bahwa Partai Kebangkitan Bangsa yang dalam berkoalisi berorientasi untuk merebut kekuasaan dan mengkapitalisasi keuntungan dalam pilkada. Namun, PKB dalam berkoalisi juga ada faktor ideologis dimana PKB

mengajak PPP membangun koalisi melihat kesamaan platform partai yang sama-sama partai hijau. Sedangkan PPP dalam membangun koalisi cenderung mengarah pada faktor ideologis karena mengusung visi yang sama dalam merebut kekuasaan, juga pragmatis karena mempertimbangkan tingkat keterpilihan kandidat.

